

VAKSINASI DE-IDEOLOGISASI MELALUI STRATEGI PEMBUMIAN PANCASILA DI KALANGAN MAHASISWA INDONESIA

Angelo Basario Marhaenis M

Fakultas Psikologi Udayana, Bali

Email : angelomanurung@gmail.com

Abstrak

Radikalisme sebagai sebuah pandangan terhadap keinginan untuk melakukan sebuah perubahan yang mendasar sesuai dengan apa yang menjadi keyakinannya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya. Saat ini, NKRI sedang mengalami cobaan dimana kelompok radikal-fundamentalis mencoba untuk menggoyahkan Ideologi Pancasila dan eksistensi NKRI. Mahasiswa sebagai agent of change di kalangan perguruan tinggi sangat rentan terhadap paham radikalisme, namun di sisi lain mahasiswa sangat berpotensi menjadi figur yang dapat penjunjung Pancasila yang setia. Radikalisme dapat diatasi dengan vaksinasi deideologi Pancasila, yaitu upaya dalam memberikan sebuah suntikan atau kekebalan terhadap masyarakat atas radikalisme ideologi lain, agar senantiasa terus melakukan proses penyebaran, penanaman, dan pendalaman ideologi Pancasila.

Kata kunci : *Pancasila, radikalisme, vaksinasi de-ideologisasi, mahasiswa*

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sarat dengan keberagaman, baik itu agama, kepercayaan, suku, budaya, dan bahasa. Data Badan Pusat Statistik (Mei 2019), wilayah Indonesia terbentang seluas 1.913.578 km² yang terdiri dari 34 provinsi, 17.504 pulau, 1128 suku, 269 juta jiwa, 6 agama dan beragam aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta 546 bahasa daerah aktif. Sebagai landasan falsafah bernegara, Indonesia memiliki Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara menjadi magnet pemersatu bagi bangsa dan Negara Indonesia dengan segala keberagamannya.

Akan tetapi, belakangan ini Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengalami berbagai peristiwa dan guncangan, saat sejumlah kelompok radikal-fundamentalis mencoba untuk menggoyahkan Ideologi Pancasila dan eksistensi NKRI. Berbagai peristiwa radikalisme khususnya di Jakarta sangat marak terjadi, seperti isu politik agama untuk menjatuhkan calon gubernur, demonstrasi tak berkesudahan, perang tensi di media sosial, serta pelarangan pembangunan rumah ibadah. Radikalisme tampak semakin nyata melalui hasil riset Badan Intelijen Negara-BIN (2017) yang menunjukkan bahwa 39% mahasiswa di Indonesia terpapar radikalisme. Peristiwa-peristiwa tersebut menyadarkan kita semua bahwa harus ada upaya progresif-revolusioner yang dilakukan

untuk mempertahankan, merawat, dan membumikan Ideologi Pancasila. Saat ini, kita memiliki tantangan besar untuk membangun semangat ke-bhinekatunggalika-an dengan saling bergandengan tangan untuk melakukan aksi- aksi konkrit sebagai bukti kecintaan terhadap Indonesia dan Pancasila.

Pencegahan radikalisme di kalangan perguruan tinggi dapat dilakukan dengan deteksi dini gerakan pemahaman radikal dari atas ke bawah yang dilakukan oleh pihak luar, maupun yang dilakukan dari bawah ke atas oleh individu itu sendiri. Selain itu dapat juga dilakukan dengan menggali pemahaman radikal melalui berbagai sumber sehingga individu memiliki pemahaman dan pemaknaan terhadap radikalisme dan bahayanya (Ramdhani dkk, 2020).

Pola antisipasi radikalisme berbasis komunitas yang dilakukan di Indonesia, yaitu melalui organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, maupun berbagai forum yang bertujuan untuk menangkal radikalisme dan terorisme (Khoiri dan Asmani, 2020). Wonga, Khiatani, dan Chui (2019) berpendapat bahwa pada tingkat mahasiswa, sosialisasi sangat penting dilakukan untuk mengatasi radikalisme yang ada.

Oleh karena itu, untuk mengatasi radikalisme, diperlukan pembahasan secara mendalam, sehingga “Vaksinasi Deideologi Melalui Strategi Pembumian Pancasila di Kalangan Mahasiswa Indonesia” ini menjadi penting untuk diulas.

Radikalisme

Menurut Rubaidi (2007), radikalisme adalah gerakan yang biasanya mengatasnamakan keagamaan dan berupaya untuk merombah atau mengubah total tatanan sosial dan politik yang tidak sesuai dengan keyakinannya dengan jalan kekerasan. Radikalisme merupakan lingkup gerakan dalam hal sosial maupun politik dengan merepresentasikan sisi ekstrim yang dapat melibatkan aksi kekerasan atas dasar keyakinan dengan tujuan untuk meraih tujuan gerakan (Cross, 2013). Adapun menurut Khamid (2016), penyebab dari munculnya paham radikalisme adalah karena rasa tidak percaya dan ketidakpuasan atas kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. Sementara, Hasani dan Naispospos (2010), menekankan radikalisme sebagai sebuah pandangan terhadap keinginan untuk melakukan sebuah perubahan yang mendasar sesuai dengan apa yang menjadi keyakinannya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya.

Dalam tulisan ini akan dikupas sebuah konsep tentang radikalisme dengan mengedepankan acuan utama bahwa radikalisme adalah paham anti Pancasila. Selanjutnya, dikembangkan 5 (lima) dimensi untuk menguraikan lebih jelas mengenai konsep radikalisme. Kelima dimensi dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Fanatisme pada Keyakinan

Upaya untuk mengejar atau mempertahankan keyakinannya secara ekstrem, reaktif, manipulatif, menghalalkan segala cara, dan melebihi batas kewajaran umat beragama/berkepercayaan. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan nilai luhur Pancasila, khususnya sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana Indonesia memiliki keberagaman keyakinan yang harus dihormati.

a. Intoleran

Intoleransi merupakan ketidakbersediaan orang dalam menerima perbedaan, mereka meniadakan harkat martabat manusia. Padahal sesungguhnya manusia yang merupakan umat beragama yang memiliki Tuhan, seharusnya sadar bahwa keberadaan manusia di bumi ini tentunya tidak akan pernah sama dihadapan Tuhan. Heterogenitas yang diciptakan Tuhan justru dalam kehidupan kita akan menciptakan keseimbangan dalam berkehidupan. Keberagaman seharusnya akan

mendatangkan kebahagiaan dan melengkapi satu sama lain. Penyebabnya adalah karena kurang adanya rasa bertenggang rasa kepa sesama, dalam wilayah kampus penyebabnya bisa adalah kurangnya pendidikan pancasila saat ini, pendidikan pancasila dianggap hanya menjadi pelajaran yang terkesan basa-basi dan ketika sudah muncul cikal bakal radikalisme yang terjadi hanya pembiaran, sehingga pembiaran itu akan menyebabkan tumbuh subur nya radikalisme di wilayah kampus. Selain itu, jika dilihat dari sisi fenomenologis dalam konteks pengajaran dan perkuliahan, dosen sekarang umumnya lebih menciptakan masyarakat yang gila kerja, masyarakat yang berpikir industrial, sehingga dalam perkuliahan, dosen lupa untuk memberikan wejangan dan moral kepada mahasiswa. Padahal, pesan moral itu tidak kalah pentingnya dengan teori yang ada.

b. Keyakinan akan kebenaran tunggal dan bersifat eksklusif

Keyakinan akan kebenaran tunggal dan bersifat eksklusif merupakan output dari pemahaman agama yang dipikirkan secara sempit dan tidak

melalui proses rasionalisasi dan objektifikasi. Individu yang merasa eksklusif keyakinannya adalah individu yang tidak memahami bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu adalah Tuhan lintas agama, dia hanya merasa bahwa Tuhan dialah yang paling benar dan tidak merasa Tuhan Sang Maha Pencipta untuk semua umat. Jadi, penerimaan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu harus diikuti kebebasan beragama dan menjalankan ibadah agama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan moderasi agama, hal ini bisa dilakukan dengan mencari persamaan-persamaan antar agama, sehingga persamaan ini yang nantinya dapat menyatukan individu yang berbeda agama.

2) Dehumanisasi

Perilaku tidak menghormati harkat manusia secara utuh yang dilakukan dengan merendahkan sesama manusia, menyangkal dan menginjak-injak nilai kemanusiaan. Dehumanisasi merupakan dimensi yang terutama bertolak belakang dengan sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dimana kemanusiaan pada hakikatnya merupakan cermin dari keilahian dengan menyadari bahwa manusia merupakan karya Ilahi yang paling sempurna.

a. Kekerasan

Radikalisme sering diidentikkan dengan kekerasan karena orang yang bersifat radikal biasanya memiliki kekuatan untuk memaksa dan berbuat semau mereka. Apalagi, jika kekuatan itu diiringi dengan kekuasaan, maka hal tersebut akan menimbulkan kekerasan yang lebih kejam. Jika mereka tidak memiliki kekuasaan untuk memaksa, biasanya yang dilakukan adalah usaha nekat yang akan berujung dengan kekerasan pula. Kekerasan seyogyanya tidak hanya dalam bentuk fisik (non verbal), namun juga terdapat dalam bentuk verbal, dan yang biasanya terjadi dalam konteks dunia kampus adalah kekerasan dalam bentuk verbal yang biasanya sering juga terjadi lewat media sosial. Ujaran kebencian antar mahasiswa kampus atau bisa juga dari dosennya sendiri yang berbicara kasar dan hal yang tidak etis kepada mahasiswanya.

b. Penindasan atas manusia

Dalam konteks dunia kampus, dosen merupakan faktor penentu dalam menciptakan manusia yang tidak radikal. Dosen haruslah menerapkan tiga

pilar dari Ki Hajar Dewantara. Ketika didepan, dosen mengajar. Ketika ditengah, dosen memberikan contoh kepada mahasiswanya, dan ketika dibelakang, dosen membiarkan mahasiswanya berpikir. Hal ini tidak akan ada di kampus, kecuali dosennya sendiri yang mencontohkan. Biasanya, tanpa disadari, dosenlah yang mencontohkan perilaku menindas kepada mahasiswanya, contohnya ketika secara gamblang mengatakan bahwa mahasiswa tersebut belum membayar SPP; hal ini mungkin dilakukan secara tidak sadar oleh dosen tersebut, tetapi pada akhirnya mahasiswa akan merasa tertindas atas kalimat tersebut. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya penindasan atas manusia ini, baiknya dimulai dari dosen itu sendiri sebagai garda terdepan untuk mengatasi hal-hal radikalisme pada masyarakat kampus.

3) Disintegrasi (Bangsa)

Keadaan tidak bersatu padunya sebuah keutuhan. Dalam hal ini disintegrasi yang dimaksud adalah disintegrasi bangsa, yang dicirikan dengan memudarnya semangat persatuan, kesatuan antargolongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa, rasa memiliki sebagai sebuah bangsa, nasionalisme dan patriotisme kebangsaan. Dimensi ini terutama bertolak belakang dengan sila ketiga: Persatuan Indonesia.

a. Memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa

Jika dilihat pada fenomena saat ini, intoleransi itu digunakan sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan ekonomi dan politik.

Contoh yang nyata terlihat adalah saat Pilkada, dimana sangat terlihat intoleransi beragamanya yang dapat memicu perpecahan bangsa. Pada masyarakat kampus, hal yang sama terjadi. Mahasiswa merupakan penggerak bangsa, apabila terdapat oknum-oknum tertentu yang memecah belah, dan menyalahgunakan politisasi agama, suku, ras, golongan maka mahasiswa yang tidak kuat pendirian akan gampang terprovokasi dan terpecah belah.

b. Tidak menghargai keberagaman sebagai keniscayaan

Penyebab dari rasa tidak menghargai keberagaman ini bisa disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam kebebasan beragama. Pemerintah cenderung melakukan pembiaran, sehingga mereka yang mendapatkan posisi dominan atau mayoritas menyalahgunakan haknya. Kemudian hal ini juga ada

hubungannya dengan fanatisme berlebihan tadi bahwa mereka menganggap mereka yang paling benar, orang lain yang berbeda tidak diterima Tuhan. Kemudian dalam konteks dunia kampus, terkadang kampus itu dikuasai oleh suku atau agama tertentu, terdapat misi tertentu dalam kampus yang memaksakan akses agama tertentu pula, sehingga dari sistematika kampus yang seperti ini kemudian ditransfer kepada mahasiswanya dan menyebabkan masyarakat kampus di dalamnya anti perbedaan.

4) Egoisme dan Kebebasan 'Berlebihan'

Mengacu pada tindakan yang didasarkan atas dorongan untuk mengejar dan memenuhi kepentingan/keuntungan diri sendiri daripada kepentingan/ kesejahteraan masyarakat banyak. Egoisme bertolak belakang terutama dengan sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dimana pengambilan keputusan tidak lagi mengedepankan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat.

a. Mengedepankan kepentingan diri dan/atau kelompok dalam pengambilan keputusan

Kepentingan kelompok harus berada di atas kepentingan individu. Salah satu kepentingan kelompok yang tidak terakomodir akan menyebabkan ketidakadilan. Saat ini, banyak terjadi ketidakadilan, para pakar dan pengambil kebijakan juga tidak luput dari kesalahan ini.

Dalam konteks pendidikan, ketidakadilan itu seharusnya tidaklah sulit jika masing-masing dosen memahami tugas dan fungsinya dalam menciptakan akhlak

manusia. Kepedulian dan keselarasan dalam hal ini dibutuhkan, bukan hanya tenaga pendidik, namun tenaga pendukung akademik juga perlu, sehingga terciptalah suasana akademik yang diinginkan. Keadilan dalam dunia kampus mengacu kepada kesamaan kita dalam memperlakukan orang lain, tanpa melihat latar belakang dan aspek-aspek perbedaan lainnya. Para dosen untuk mengatasi upaya ini harus mampu mengidentifikasi, sehingga penanganan-penanganan ketidakadilan yang dirasakan mahasiswa bisa dikendalikan.

b. Mengabaikan demokrasi ekonomi dan politik kerakyatan

Dalam konteks dunia kampus, kasus kasus pengabaian demokrasi biasanya muncul karena keberadaan komunitas yang dianggap benar itu.

Kemudian, mereka akan menguasai dan pada akhirnya mendominasi dan mengabaikan demokrasi. Contohnya cukup jelas, misalnya saat pengambilan keputusan dalam hal pemberian beasiswa yang mengedepankan kelompok-kelompok tertentu. Selain itu, pembentukan badan-badan mahasiswa yang strategis hanya diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu pula; demikian juga pemilihan ketua BEM dari agama tertentu. Dengan demikian perlu kawalan bagi institusi untuk mengurangi regulasi pengabaian demokrasi seperti ini.

5) Eksploitasi

Pemanfaatan sumber daya secara berlebihan untuk kepentingan diri sendiri dan atau kelompok serta bersifat sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek, tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan dan prinsip keadilan. Eksploitasi bertolak belakang terutama dengan sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dimana prinsip keadilan bagi yang berhak tidak lagi dinomorsatukan.

a. Upaya penghisapan atas sumber daya

Eksploitasi itu *engaged* dengan pengabaian demokrasi. Ketika demokrasi sudah diabaikan, maka kelompok tertentu akan mencoba menekankan kepentingannya. Dalam hal penekanan kepentingan ini salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan eksploitasi atau penghisapan atas sumber daya. Namun, perlu diberi penjelasan lebih jelas, eksploitasi seperti apa yang tidak diperbolehkan. Dalam dunia pendidikan, eksploitasi yang dilakukan biasanya eksploitasi intelektual. Eksploitasi bisa terjadi dalam bidang pengajaran ataupun dalam hal riset.

b. 'Keberhakan' yang menindas

Keberhakan yang menindas sangat identik dengan pemanfaatan sumber daya secara berlebihan dengan menekan hak-hak kelompok tertentu. Kasus-kasus penindasan akan hak warga kampus yang biasa terjadi dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan/atau kelompok mayoritas. Contohnya dalam hal penerimaan mahasiswa; dan biasanya ada usaha '*sogok-menyogok*' untuk masuk ke dalam suatu perguruan tinggi, istilahnya ada '*red carpet*' bagi mereka yang memiliki kenalan dengan orang yang memiliki kekuasaan tersebut, mereka yang memiliki harta lebih untuk membayar,

sehingga orang-orang yang sebenarnya memiliki kemampuan intelektual tinggi tetapi tidak memiliki akses akan tertindas haknya.

Ideologi

Ideologi berasal dari dua kata yakni *ideos* yang berarti gagasan, dan *logos* yang berarti ilmu. Dengan demikian, ideologi merupakan suatu ilmu tentang gagasan. Gagasan yang dimaksud adalah gagasan mengenai masa depan, jadi dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah sebuah ilmu tentang masa depan. Namun, ideologi bukan hanya sekedar gagasan, melainkan harus diikuti dan dianut oleh sekelompok besar manusia atau bangsa. Oleh karena itu, ideologi bersifat menggerakkan manusia untuk merealisasikan gagasan tersebut. Definisi tersebut bersifat umum, artinya dapat digunakan dan berlaku untuk ideologi-ideologi lain seperti Kapitalisme dan Sosialisme.

Ideologi memiliki fungsi penting yaitu menanamkan keyakinan perjuangan kelompok atau kesatuan yang berpegang teguh pada ideologi tersebut. Ideologi menjadi sumber inspirasi dan sumber cita-cita hidup bagi para warganya, khususnya bagi generasi muda. Ideologi berupa pedoman artinya menjadi pola dan norma hidup, sekaligus menjadi ideal atau cita-cita. Oleh karena itu, manusia mampu mengorbankan harta benda, bahkan hidupnya demi ideologi karena ideologi menjadi pola, norma hidup, dan dikejar pelaksanaannya sebagai cita-cita, maka ideologi pantas menjadi bentuk hidup.

Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara

Pancasila pada dasarnya adalah Primer yaitu sebagai ideologi sekaligus dasar negara Republik Indonesia. Primer ini sendiri memiliki makna bahwa Pancasila menyangkut maksud dan tujuan semula. Primer, juga dapat diartikan sebagai fungsinya semula.

Pancasila sebagai ideologi berakar dari Marhaenisme ajaran Soekarno. Rumusan ideologi Marhaenisme yang dimasukkan ke dalam ideologi Pancasila diusulkan secara jelas dan tegas oleh Bung Karno dalam Pidatonya tanggal 1 Juni 1945 di muka sidang terbuka *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* yang lebih populer dengan nama Badan Penyelidik Usaha-usaha

Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Pidato Ir. Soekarno tersebut dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan dari K.R.T. Radjiman Widiyodiningrat yang merupakan Ketua BPUPK

kepada para anggotanya dengan mengucapkan "Negara Indonesia Merdeka yang kita bentuk, apa dasarnya?".

Peran Pancasila sebagai ideologi negara yaitu memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan tolak ukur oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral, oleh karena itu pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunaannya.

Apabila aturan Pancasila sebagai ideologi negara dilanggar, maka hukumannya berupa sanksi moral dan sosial. Mereka yang melanggar dan tidak berpedoman pada nilai-nilai Pancasila tidak akan terkena sanksi hukum. Ada baiknya mereka merasa malu dengan segala sikap dan tingkah lakunya yang melanggar norma Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara mengalami beberapa masa perkembangan. Seperti halnya Pancasila di masa orde lama, Pancasila di masa orde baru, dan Pancasila di era reformasi. Berbagai pihak dan para ahli sepakat apabila ideologi Pancasila merupakan kumpulan gagasan yang disepakati bersama, dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hasil kesepakatan yang menyatakan Pancasila sebagai ideologi negara ini yang harus dipertahankan dan dipraktikkan dalam kehidupan bernegara yang berbeda-beda suku bangsa ini.

Tantangan lain dapat menjadi ancaman serius bagi nilai-nilai luhur Pancasila adalah tantangan radikalisme. Paham radikalisme harus secara tegas kita tolak. Paham ini pada dasarnya berasal dari pendatang Timur Tengah yang memutuskan tinggal di Indonesia demi menanam bibit-bibit ideologi tersebut. Ideologi ini terlalu keras bagi mereka yang tidak paham toleransi. Paham ini akan lebih mengunggulkan individunya lebih keras dan jadi lebih jahat sehingga paham atau aliran yang keras ini dapat mengganggu keamanan dan keutuhan bangsa. Radikalisme sangat mengganggu kedaulatan pancasila, terutama sila ke-3 yaitu Persatuan Indonesia dan ke -1 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari paham radikalisme yaitu mengadakan perubahan sampai keakarnya untuk mengupayakan usaha mereka melakukan "kekerasan" serta menentang struktur yang sudah ada.

Peran Pancasila jelas sangat penting untuk menyaring ideologi yang tidak sesuai dengan yang sudah diamalkan oleh negara. Peran Pancasila sudah menjadi acuan dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Penanaman nilai-nilai Pancasila harus mulai dimasukkan kedalam pembinaan ideologi masyarakat sejak dini. Pembinaan budi pekerti juga menjadi salah satu cara menumbuhkan rasa memiliki Pancasila pada dirinya. Pancasila harus menjadi patokan dalam menjalankan kegiatan disegala lini. Nilai-nilai Pancasila serta penguatan pendidikan karakter perlu ditanamkan, terutama pada mahasiswa. Pancasila yang sudah disusun oleh pendiri bangsa kita sudah menjadi landasan yang pas dan juga sesuai dengan budaya negara.

Nilai-nilai luhur pada Pancasila akhirnya dapat menjadi magnet pemersatu dari bangsa dan negara Indonesia dengan segala macam kekayaan serta keberagamannya. Indonesia ini sendiri memiliki luas daerah 1.913.578 KM², memiliki 34 Provinsi, memiliki 17.504 Pulau, terdapat 1128 Suku, terdapat 269 Juta Jiwa, terdapat 6 Agama, dan terdapat 546 Bahasa Daerah Aktif (BPS, Mei 2019). Ir. Soekarno kerap kali menegaskan bahwa ***“Hanya Pantjasila-lah yang dapat tetap mengutuhkan Negara kita”***. Pancasila merupakan jiwa atau kepribadian bangsa Indonesia. Tanpa Pancasila, Indonesia tidak punya jiwa. Pancasila yang digali Ir. Soekarno berakar dari nilai-nilai luhur kebijaksanaan hidup tradisi kearifan lokal jika didefinisikan sebagai kepribadian bangsa. Kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan kekayaan budaya bangsa mencakup kebijakan hidup, pandangan hidup dan dijadikan sebagai kebijaksanaan hidup. Di Indonesia—yang kerap disebut Nusantara—kearifan lokal ternyata tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya atau etnik tertentu, tetapi dapat dikatakan bersifat lintas budaya atau lintas etnik sehingga membentuk nilai budaya yang bersifat nasional. Contohnya: gotong royong, kekeluargaan, toleransi, budi pekerti, keramah-tamahan, keharmonisan sosial dan alam, etos kerja, dan banyak lagi yang lainnya.

Benang merah dari kelima sila Pancasila membangkitkan kembali keyakinan ideologi dan keyakinan konstitusi bagi masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Keyakinan ideologis dan keyakinan konstitusi membantu seluruh elemen bangsa untuk memperjuangkan Pancasila sebagai ideologi terapan dan terapan ideologi dalam memecahkan masalah bangsa, terutama melawan segala bentuk dan manifestasi. Musuh revolusi Indonesia pada saat ini dalam bentuk, diantaranya: berakar dan bertumbuhnya berbagai gerakan fundamentalisme- radikalisme, penjajahan ekonomi neo kapitalisme- imperialisme yang pada akhirnya bisa mengganggu eksistensi kita sebagai sebuah bangsa, dimana ***“Kita”*** akan menjadi bangsa yang ***“tidak lagi”*** : ***berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan”***.

Oleh karenanya, segala upaya mengkhianati Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara merupakan pengkhianatan terhadap eksistensi negara Pancasila yang diproklamlirkan 17 Agustus 1945.

Vaksinasi Deideologisasi

Vaksinasi (*vaccination*) adalah imunisasi terhadap penyakit menular melalui pemberian vaksin untuk menghasilkan imunitas yang protektif terhadap penyakit tersebut. *Vaccinate* (memvaksinasi) / kata kerja: proses memasukkan vaksin kedalam tubuh agar terbentuk imunitas. Vaksinasi juga dapat dikatakan sebagai pemberian vaksin khusus dalam rangka meningkatkan kekebalan seseorang terhadap sebuah penyakit. Misal adalah vaksinasi COVID-19 yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kekebalan tubuh seseorang apabila terserang virusnya. Vaksinasi juga bertujuan untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat suatu penyakit. Vaksinasi ini sendiri merupakan imunasi aktif yang dapat memicu tubuh untuk mengeluarkan antibodi terhadap virus atau kuman tertentu. Vaksinasi akan menimbulkan reaksi imunitas tubuh yang nantinya dapat mempersiapkan tubuh untuk melawan serangan infeksi di kemudian hari.

Deideologisasi merupakan suatu upaya untuk menghentikan proses pendalaman atau penyebaran ideologi kepada masyarakat, dalam hal ini ideologi yang dimaksud ialah Pancasila. Vaksinasi deideologisasi merupakan sebuah upaya dalam memberikan sebuah suntikan atau kekebalan terhadap masyarakat agar dapat terus melakukan proses penyebaran, penanaman, dan pendalaman ideologi.

Cara Melakukan Vaksinasi De-ideologisasi

Pembangunan jiwa bangsa adalah membangun bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan memiliki satu kesatuan jiwa yang kokoh kuat, kebanggaan nasional (*national pride*), karakter, kepercayaan diri, sehingga sanggup menghadapi berbagai tantangan, hambatan, dan masalah. Untuk tercapainya *Nation & Personal Character Building*, maka kita harus memiliki visi dan ideologi yang jelas dan berakar dari rahimnya ibu pertiwi, memiliki sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh potensi nasional dan memahami sejarah perjuangan bangsa.

Kebangkitan kaum kebangsaan saat ini, harus dipandang sebagai proses dinamika dan dialektika sejarah yang dapat dicapai dengan membangun kesadaran dan solidaritas bersama, melakukan sinergi agar kekuatan sebuah bangsa bersatu padu dalam peziarahan menghancurkan segala bentuk penghalang cita-cita pembangunan bangsa. Di

tengah optimisme yang masih tersisa, kita yakin bahwa gerakan bangun diri kesadaran berbangsa dan bernegara akan melahirkan kekuatan yang memiliki gagasan, pemikiran dan sikap yang kritis serta memiliki pikiran dan tindakan alternatif, terutama yang harus disemaikan terus menerus di kalangan mahasiswa. Tahapan langkah yang dapat dilakukan mahasiswa untuk vaksinasi de-ideologisasi sebagai berikut:

1) Mahasiswa pertama-tama harus belajar dari pengalaman sejarah yang sangat memprihatinkan atas perpecahan dan konflik lestari pada bangsa ini, khususnya bagi kaum kebangsaan, sehingga dipandang perlu **membentuk adanya suatu 'Platform'** perjuangan dalam mengembalikan 'jati-diri sebagai bangsa', mempertahankan eksistensi dan memperkuat basis massa aksi. Dalam pembentukan *platform*, diperlukan metode perjuangan dan kerangka berpikir. Meminjam kerangka yang pernah dipakai Bung Karno adalah berpikir Romantis-Dinamis-Dialektis-Revolusioner agar kita dapat menyatukan persepsi dan tafsir ideologi serta menghilangkan cara-cara dogmatis. Dengan demikian hal tersebut dapat menimbulkan sikap kritis dan kreasi-kreasi gerakan dengan satu visi, misi, dan langkah perjuangan. Bung Karno mengatakan bahwa revolusi bukan sekedar mengusir pemerintahan Belanda dari Indonesia. Revolusi Indonesia memiliki tiga kerangka yakni : Revolusi Indonesia menuju kepada Sosialisme, Revolusi Indonesia menuju ke Dunia Baru, serta Revolusi Indonesia tanpa *exploitation de l'homme par l'homme dan exploitation de nation par nation*.

2) Melakukan Refleksi : Kesadaran reflektif sebagai bangsa menuntut bahwa revolusi Indonesia masih dibutuhkan dan sangat kontekstual pada saat ini untuk menjawab problematika kompleks kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang tinggal menunggu keruntuhannya. Mahasiswa bukan sekedar berdemo untuk menuntut sesuatu, namun sebaliknya, **mahasiswa harus paham tentang cita-cita revolusi** yang sesungguhnya. Untuk tercapainya cita-cita revolusi, maka diperlukan tiga syarat mutlak yaitu romantika, dinamika, dialektika. **Romantika** adalah sumber kekuatan abadi daripada perjuangan. **Dinamika** merupakan suatu proses panjang yang bergerak terus dan harus bergerak terus. Tanpa dinamika, maka revolusi akan mandek di tengah jalan. Sementara **Dialektika** adalah suatu proses jalan pasang-surut, jalan *sokar-jerit*, jalan lurus-berliku-liku dan jalan naik-turun dalam perjuangan.

3) Setelah terpenuhinya syarat revolusi, mahasiswa perlu paham **hukum-hukum revolusi** agar tidak terjebak pada kedangkalan emosional. Bung Karno menegaskan enam pokok hukum revolusi yaitu Pertama, revolusi harus mengetahui siapa kawan dan

lawan siapa, maka harus ditarik garis pemisah yang tegas untuk mengambil sikap yang tepat terhadap kawan dan lawan revolusi; Kedua revolusi yang dimaksud adalah revolusi rakyat, sehingga harus dijalankan dari atas (*top-down*) dan dari bawah (*bottom-up*). Ketiga, revolusi merupakan simfoni destruksi dan konstruksi (menjebol dan membangun); karena destruksi tanpa konstruksi adalah anarki dan sebaliknya konstruksi tanpa destruksi berarti kompromi (*reformisme*). Keempat, revolusi harus mempunyai tahap- tahap perjuangan; tahap yang pertama meretas tahap kedua dan seterusnya, inilah dialektika revolusi. Kelima, revolusi harus memiliki program yang jelas dan tepat; dasar/tujuan dan kewajiban, kekuatan, sifat, masa depan dan musuh revolusi. Keenam, revolusi harus mempunyai sosok guru dan pemimpin yang tepat dan sanggup menjalankan tugas-tugas revolusi serta mempunyai kader-kader yang tepat dan tinggi semangat perjuangannya. Itulah sebabnya, menyikapi kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada saat ini dipandang perlu dibangunnya kesepakatan nasional untuk melahirkan kembali Revolusi Indonesia. Hanya melalui revolusi, Indonesia bisa bangkit kembali dan kelak akan menjadi bangsa yang besar, makmur, dan kuat di antara bangsa-bangsa.

4) Mahasiswa melakukan diskusi dan kordinasi dengan berbagai pihak yang mau dan mampu untuk bersama-sama melakukan pembumian Pancasila dan menolak ideologi lain

5) Mahasiswa harus terus menerus mengawal dan melakukan evaluasi terhadap hasil kerjanya tersebut; bagaimana dampak vaksinasi de-ideologisasi tersebut dan efektivitasnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Radikalisme merupakan tantangan terbesar saat ini, terutama di kalangan mahasiswa di Indonesia. Radikalisme dapat diatasi dengan vaksinasi deideologi Pancasila, yaitu upaya dalam memberikan sebuah suntikan atau kekebalan terhadap masyarakat atas radikalisme ideologi lain, agar senantiasa terus melakukan proses penyebaran, penanaman, dan pendalaman ideologi Pancasila.

Saran

Diperlukan penguatan di kampus dan kerjasama terus menerus seluruh sivitas akademika (mahasiswa, dosen dan karyawan) agar dapat terlaksana vaksinasi

deideologisasi baik terhadap dirinya sendiri, masyarakat sekitar, dan seluruh bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Masnur. (2020). *A Collaborative Action in the Implementation of Moderate Islamic Education to Counter Radicalism. International Journal of Innovation, Creativity and Change. Volume 11, Issue 7 (497-516).*
- Cross, R. (2013). Radicalism. Dalam Snow, D., della Porta, D., Klandermans, B., dan McAdam, D. (eds.). *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements.* doi:10.1002/9781405198431.wbespm175
- Hakis, H. (2020). Komunikasi Preventif Radikalisme Agama pada Mahasiswa di Perguruan Tinggi Kota Ambon. *Jurnal Ilmu Komunikasi. 10, 2 (Oct. 2020), 95-108.*
- Hasani, I., & Naipospos, B.T. (2010). *Radikalisme Agama di DKI Jakarta & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan.* Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Huda, U., & Haryanto, T. (2018). Strategi Penanggulangan Radikalisme di Perguruan Tinggi Kabupaten Banyumas. *An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam, 5(1), 39-61.*
- Khamid, N. (2016). Bahaya Radikalisme terhadap NKRI. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities, 1(1), 123-152.*
- Khoiri dan Asmuni. (2020). *The Patterns of Radicalism Anticipation Based on Community in Indonesia. International Journal on Language, Research and Education Studies. Vol. 4 No. 1 (180-193).* doi: 10.30575/2017/IJLRES-2020010414
- Latif, Y (2017), Mata air keteladanan Pancasila dalam perbuatan. Jakarta: Mizan.
- Mardiyah, D. (2010). Kebahagiaan pada Pemimpin Perempuan. *Skripsi.* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Manurung, ADR., Kanumoyoso, B. *Nation & Personal Character Building. Hasil Penelitian pada Mahasiswa. 2020*
- Rahayu, S. W., Sugianto, F., & Velicya, V. (2020). Penguatan Pemahaman terhadap Pengaruh Radikalisme sebagai Upaya Mitigasi Risiko dan Perlindungan Anak. 101.
- Ramdhani, Hilal & Novian, Rayhan Musa. (2020). *Actualization of Political Education in Digital Learning to Prevent Radicalism. International Journal of Education & Curriculum Application. Vo. 3 No. 2 (98-103)*
- Riyanto, A., Ohiotimur, J., Mulyatno, C.B., & Madung, O.G., (2015) *Kearifan lokal Pancasila, butir-butir filsafat Keindonesiaan, Editor, Yogyakarta : Kanisius*
- Rubaidi, A. (2007). *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa depan Moderatisme Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Sastraprteja, M. (2013). Lima Gagasan yang dapat mengubah Indonesia. Jakarta: Pusat Kajian Filsafat dan Pancasila
- Soekarno (2010). *Indonesia menggugat.* Jakarta : Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR-RI
- Soekarno (1964) *Di bawah bendera revolusi.* Jakarta : Panitia Penerbit
- Wilujeng, Nila Febri & Risman, Helda. (2020). *Examining, ASEAN Our Eyes Dealing with Regional Context in Counter Terrorism, Radicalism, and Violent Extremism. International Journal of Social Sciences. Vol 6, Issue 1 (267-281).* DOI:

<https://doi.org/10.20319/pijss.2020.61.267281>

Wonga, Khiatani, dan Chui. (2019). *Understanding youth activism and radicalism: Chinese values and socialization. The Social Science Journal*. Vol. 56 Issue 2 (255-267). doi: <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2018.08.006>